

Analisis Kesesuaian Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah di Surabaya

Patrisius Valdoni Sandi¹⁾, Felisitas Sintia Empak²⁾,
Venansius Janto³⁾

¹⁾ Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik
Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Ruteng, Indonesia

Email: valdonisandi@unikastpaulus.ac.id

²⁾ Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik
Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Ruteng, Indonesia

Email: valdonisandi@unikastpaulus.ac.id

³⁾ Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik
Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Ruteng, Indonesia

Email: valdonisandi@unikastpaulus.ac.id

Received: 2023-02-15; Accepted: 2023-08-15; Published: 2023-09-30

Abstract

Government Procurement of Goods and Services (PBJP) of construction is one of the products of the government policy system to meet the infrastructure needs of the community so that it is necessary to implement it professionally by applying PBJP principles including efficient and effective principles. The city of Surabaya as one of the largest cities in Indonesia has massive infrastructure development and has a good record in implementing its PBJP. Therefore, this research is needed to analyze the application of the efficient and effective principles of PBJP in the construction sector in Surabaya, so that it can be an example and reference for the development of PBJP service systems in other regions in Indonesia. Using the *Importance Performance Analysis (IPA)* approach, the degree of conformity of the application of efficient and effective principles was obtained, which reached 87.91% and 86.31%, respectively. However, with a value that is still below 100%, it is necessary to make improvements. Based on the analysis with quadrant propagation, the indicators needed to be improved immediately with the classification of quadrant A (the main priority of improvement) were obtained to improve the suitability of the application of the effective principle of fi among which are trimming the procurement process time and trimming administrative costs. Meanwhile, to improve the conformity of efficient principles, among others, is to improve indicators of program integration, system quality, and minimize the number of face-to-face meetings in the implementation of the face-to-face system.

Keywords: Procurement; Construction; Principle; Importance Performance Analysis.

Abstrak

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) konstruksi merupakan salah satu produk sistem kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat sehingga perlu untuk dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip PBJP termasuk prinsip efisien dan efektif. Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki perkembangan infrastruktur yang masif serta memiliki catatan yang baik dalam pelaksanaan PBJPnya. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis penerapan prinsip efisien dan efektif PBJP sektor konstruksi di Surabaya, sehingga dapat menjadi contoh dan rujukan untuk pengembangan sistem layanan PBJP di daerah lain di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *Importance Performance Analysis (IPA)* diperoleh tingkat kesesuaian penerapan prinsip efisien dan efektif efisien dan efektif yang masing-masing mencapai 87,91% dan 86,31%. Namun, dengan nilai yang masih di bawah 100%, maka perlu untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan analisis dengan pemetaan kuadran, diperoleh indikator yang diperlukan untuk segera diperbaiki dengan klasifikasi kuadran A (prioritas utama perbaikan) untuk meningkatkan kesesuaian penerapan prinsip efektif fi antaranya adalah pemangkasan waktu proses pengadaan dan pemangkasan biaya administrasi. Sedangkan untuk meningkatkan kesesuaian prinsip efisien di antaranya adalah dengan memperbaiki indikator integrasi program, kualitas sistem, dan meminimalisasi jumlah tatap muka dalam pelaksanaan sistem tata muka.

Kata Kunci: Pengadaan; Konstruksi; Prinsip; Importance Performance Analysis.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan suatu program yang dihasilkan dari

kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya kebutuhan infrastruktur melalui PBJP konstruksi. Posisi konstruksi pada sistem

kebijakan pengadaan menempati posisi strategis. Sandi (2020) menyatakan bahwa pengadaan konstruksi merupakan pengadaan yang berkaitan dengan keseluruhan atau sebagian kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pembongkaran, dan bahkan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pengadaan dan proyek konstruksi menjadi hal yang tak dapat dipisahkan. Sandi (2023) menyatakan bahwa kedua hal ini terlibat dalam lingkaran ekonomi, kepemimpinan, manajemen, persoalan budaya, lingkungan, serta mengintegrasikan kepentingan semua pihak untuk mewujudkan fasilitas yang hendak dibangun. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan konstruksi harus dilakukan dengan profesional dan bertanggung jawab demi memenuhi harapan semua pemangku kepentingan.

Dalam perkembangannya, untuk mengakomodir pelaksanaan pengadaan termasuk konstruksi, pemerintah kemudian membentuk suatu sistem pengadaan berbasis teknologi elektronik yang dikenal dengan nama pengadaan elektronik atau *electronic procurement (e-procurement)*. Olken (2007) menyatakan bahwa *e-procurement* berkontribusi positif terhadap negara-negara berkembang yang cenderung bermasalah dengan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi. Beberapa hal yang menjadi isu besar dalam pelaksanaan sistem ini misalnya adalah persoalan komunikasi dan efisiensi biaya administrasi.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan PBJP terutama konstruksi harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, baik oleh penyedia maupun oleh pengelola kebijakan sebagai perwakilan pemerintah itu sendiri. Selain itu, pelaksanaan PBJP sektor konstruksi harus menjamin tata laksananya dengan profesional, etis, dan menjunjung prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sandi (2023) menyatakan bahwa prinsip-prinsip PBJP merupakan pondasi dasar dalam pelaksanaan PBJP. Hal ini harus dikuatkan dalam sistem kebijakan nasional masing-masing negara. Di Indonesia sendiri kebijakan terkait prinsip-prinsip PBJP tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, secara tegas disebutkan beberapa prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, di antaranya adalah efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam pencapaian prestasi penerapan pengadaan elektronik di Indonesia adalah kota Surabaya. *E-procurement* yang telah dirintis sejak 2004 kemudian menjadi pionir pengembangan sistem ini secara nasional di Indonesia. Pencapaian dan prestasi PBJP kota Surabaya, khususnya dalam sektor konstruksi, tentu menjadi hal yang perlu dianalisis penerapan kebijakannya dan tentu menjadi bahan pertimbangan upaya daerah lain dalam pengembangan pelayanan PBJP. Hal yang bisa menjadi dasar penilaiannya adalah

bagaimana penerapan prinsip-prinsip PBJP sektor konstruksi di kota Surabaya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, prinsip-prinsip PBJP menjadi pondasi pelaksanaan kebijakan PBJP, termasuk konstruksi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran yang obyektif terhadap pelaksanaan sistem PBJP konstruksi di Kota Surabaya. Penelitian akan berfokus pada penerapan prinsip efektif dan efisien sebagai tolok ukur penilaian kinerja efektifitas dan efisiensi PBJP di kota Surabaya berdasarkan perspektif atau sudut pandang penyedia yang tergambar dari tingkat kepuasan penyedia terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh pemerintah melalui badan pengadaan pemerintah.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi penerapan prinsip efektif dan efisien PBJP sektor konstruksi di Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan kepustakaan dan penyebaran kuesioner. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengolahan data terkait kualitas penerapan prinsip-prinsip PBJP berdasarkan perspektif penyedia barang dan jasa.

Metode literatur dan kepustakaan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap buku, jurnal penelitian, buku, dan hasil penelitian. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa sumber bacaan dan penelitian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Metode ini memberikan gambaran terkait indikator-indikator yang dapat diukur untuk mengevaluasi kinerja penerapan prinsip efektif dan efisien PBJP,

Metode kuesioner dilakukan dengan penyebaran kuesioner atau angket secara online kepada responden untuk menilai indikator-indikator yang telah ditetapkan berdasarkan metode literatur dan kepustakaan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah penyedia yang pernah menjadi peserta pengadaan konstruksi pemerintah di Kota Surabaya.

Penelitian ini melibatkan 30 responden yang merupakan penyedia sektor konstruksi. Jumlah ini dianggap layak dengan mengacu pada pendapat Gay dalam Emory (1995) dan Roscoe dalam Sugiyono (2012), jumlah sampel minimal yang diambil peneliti adalah 30 sampel. Hal ini juga dipertegas oleh Griffins dan Hauser dalam Wang et.al (2019) yang menyatakan bahwa pendapat 20-30 orang dibutuhkan untuk menangkap 90-95% kebutuhan pelanggan (*customer needs*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Importance Performance Analysis (IPA)* yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan penerapan prinsip efektif dan efisien PBJP. Metode ini digunakan dalam mengukur tingkat kesesuaian dengan melihat tingkat kepuasan pelanggan oleh responden. Untuk mengukur keseluruhan tingkat kepuasan responden yang mewakili

pelanggan maka diperlukan pendekatan *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

KAJIAN PUSTAKA

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pandangan Khan (2018), PBJP dapat dipahami sebagai suatu sistem yang disediakan pemerintah untuk membalanjakan uang publik dengan tujuan untuk mendapatkan barang, pekerjaan, dan layanan yang dibutuhkan untuk program dan proyek publik.

Konsep Umum Pengadaan Konstruksi

Ruparhna et. al (2015) menyatakan bahwa pengadaan konstruksi merupakan pembelian layanan terkait konstruksi dengan tujuan akhir untuk menciptakan bangunan baru atau struktur baru, termasuk perbaikan, pemeliharaan, perluasan, atau pembongkaran bangunan baru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan konstruksi upaya perolehan bangunan baru, atau ruang dalam bangunan, atau bangunan lainnya dengan tujuan pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia

Prinsip-prinsip dasar pengadaan pada umumnya dapat dipahami sebagai ketentuan/peraturan/standar yang harus atau wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Menurut Lynch (2013), prinsip PBJP merupakan pondasi dari PBJP itu sendiri dan harus diterapkan dalam peraturan terkait PBJP.

Prinsip PBJP di berbagai negara pada umumnya akan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan pembentukan kebijakan tersebut mengikuti kondisi pengalaman, budaya, dan kekhasan negara masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat tujuh prinsip pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Perpres 16 Tahun 2018 di antaranya adalah efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Prinsip Efisien

Prinsip efisien dalam PBJP diartikan dengan pelaksanaan PBJP harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk dipertanggungjawabkan.

Gunasekaran dalam Sandi dan Rahman (2020) menyatakan bahwa ketercapaian faktor-faktor efisiensi dalam PBJP akan meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan menjalankan prinsip efisiensi, maka kinerja organisasi akan berdampak positif.

Prinsip Efektif

Vaidya dan Campbell (2016) menyatakan bahwa prinsip efektif dapat dipahami dengan produktif, yang artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai manfaat yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat pula dipahami bahwa dengan sum ber daya yang tersedia maka akan

diperoleh barang dan jasa dengan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

Perbedaan Prinsip Efektif dan Efisien

Joesbury (2016) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara prinsip efektif dan efisien dalam PBJP. Prinsip efiisien berorientasi pada biaya pembelian dan efisiensi operasional, sedangkan prinsip efektif terkait dengan peningkatan dan orientasi nilai-nilai PBJP. Teo dan Lai (2009) menyatakan bahwa prinsip tersebut merupakan suatu keadaan di mana penggunaan PBJP dapat mencapai hasil yang diharapkan atau diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah otomatisasi komunikasi, transaksi, serta kolaborasi.

Importance Performance Analysis (IPA)

Importance Performance Analysis (IPA) merupakan suatu metode pengukuran yang menghubungkan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa/layanan. Martilla dan James sebagai penemu metode ini dalam penelitian Tjiptono dan Chandra (2016) menyatakan bahwa dalam metode ini responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja pelayanan (*perceived performance*) pada masing-masing atribut, kemudian akan dianalisis dan dibentuk dalam kuadran matriks yang dikenal dengan *importance performance matrix*.

Dalam analisis metode ini beberapa tahap analisis diperlukan, di antaranya adalah analisis tingkat kesesuaian (Tki). Perhitungan Tki ini merupakan hasil perbandingan dari nilai tingkat kinerja/pelaksanaan dengan nilai tingkat kepentingan. Tujuan dari perhitungan ini adalah mengetahui aspek apa saja yang perlu mendapatkan prioritas guna meningkatkan kualitas layanan (Wibisono dan Putri, 2022).

Dalam kuesioner IPA akan ditempatkan penilaian untuk responden terhadap tingkat kinerja. Penilaian tersebut menggunakan pendekatan skala Likert 1-5 (sangat tidak baik sampai dengan sangat baik), kemudian terdapat penilaian unntuk tingkat kepentingan. Analisis ini menggunakan skala Likert 1-5 (sangat tidak penting sampai dengan sangat penting)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode IPA digunakan untuk untuk mengkaji sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan (dalam hal ini adalah penyedia) terhadap pelayanan pemerintah melalui sistem pengadaan elektronik bidang konstruksi. Analisis yang digunakan adalah analisis kuadran yang terbagi dalam empat (4) kriteria.

Indikator-indikator yang diukur dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Penilaian Untuk Penelitian

Prinsip	Kode	Indikator
Efisien	EF11	Pemanfaatan sistem berbasis elektronik
	EF12	Pemangkasan waktu proses
	EF13	Penurunan jumlah sanggahan
	EF14	Sistem akses yang terpusat
	EF15	Pemangkasan biaya administrasi
	EF16	Jumlah kesalahan yang menurun
	EF17	Ketersediaan sistem klasifikasi jenis pekerjaan yang terstandar

Efektif	EFE1	Ketercapaian tujuan pengadaan
	EFE2	Ketepatan waktu pelaksanaan
	EFE3	Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat
	EFE4	Integrasi program (termasuk sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan)
	EFE5	Mekanisme pengendalian yang efektif
	EFE6	Kualitas sistem pengadaan
	EFE7	Minimalisasi komunikasi tatap muka

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 14 indikator penilaian yang digunakan dalam penelitian ini dengan masing-masing prinsip memiliki 7 indikator sebagai tolok ukur penilaian.

Analisis Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan

Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden penelitian dapat diperoleh hasil analisis dari tingkat kinerja dan tingkat kepentingan untuk masing-masing indikator prinsip efisien dan efektif. Analisis tingkat kinerja dan tingkat kepentingan diukur untuk kemudian dihubungkan dan dipetakan dalam kuadran atau matriks IPA. Data hasil analisis tingkat kinerja dan kepentingan prinsip efisien dan efektif dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Tingkat Kinerja (x) dan Tingkat Kepentingan (y) Prinsip Efisien dan Efektif

Kode	Mean		Skor Penilaian	
	Tingkat Kinerja (x)	Tingkat Kepentingan (y)	Kinerja (xi)	Kepentingan (yi)
EF11	3,967	4,633	119	139
EF12	3,733	4,500	112	135
EF13	3,967	4,100	119	123
EF14	3,933	4,400	118	132
EF15	3,833	4,467	115	134
EF16	3,767	4,533	113	136
EF17	4,200	4,533	126	136
Σ	3,914	4,452	822	935
EFE1	4,100	4,500	123	135
EFE2	3,933	1,500	118	135
EFE3	3,800	1,600	114	138
EFE4	3,600	4,367	108	131
EFE5	4,033	4,667	121	140
EFE6	3,867	4,467	116	134
EFE7	3,767	4,300	113	129
Σ	3,871	4,486	813	942

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk prinsip efisien, rata-rata tingkat kinerja mencapai 3,914 sedangkan rata-rata tingkat kepentingan mencapai 4,452. Besarnya kesenjangan antara kinerja dan kepentingan mencapai -0,538. Sedangkan untuk prinsip efektif, rata-rata tingkat kinerja mencapai 3,871 dan tingkat kepentingan mencapai 4,486. Terdapat kesenjangan sebesar -0,614. Selanjutnya untuk menyimpulkan analisis ini diperlukan analisis tingkat kesesuaian (Tki).

Analisis Tingkat Kesesuaian (Tki)

Tingkat kesesuaian merupakan perbandingan antara skor kinerja dan skor kepentingan. Analisis ini bisa menggunakan perbandingan rata-rata tingkat kinerja dan tingkat kepentingan atau dengan perbandingan skor penilaian kinerja dengan skor penilaian kepentingan. Formula perhitungan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$Tki = Xi / Yi \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

Tki = Tingkat Kesesuaian

Xi = Penilaian Kinerja/Pelaksanaan

Yi = Penilaian Kepentingan/Harapan

Dengan menggunakan formula di atas, maka dapat dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian (Tki) seperti yang ditampilkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Tingkat Kesesuaian Prinsip Efisien dan Efektif

Kode	Skor Penilaian		Tingkat Kesesuaian (Tki) %
	Kinerja (xi)	Kepentingan (yi)	
EF11	119	139	85,61
EF12	112	135	82,96
EF13	119	123	96,75
EF14	118	132	89,39
EF15	115	134	85,82
EF16	113	136	83,09
EF17	126	136	92,65
Σ	822	935	87,91
EFE1	123	135	91,11
EFE2	118	135	87,41
EFE3	114	138	82,61
EFE4	108	131	82,44
EFE5	121	140	86,43
EFE6	116	134	86,57
EFE7	113	129	87,60
Σ	813	942	86,31

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat tingkat kesesuaian masing-masing antara prinsip efisien dan prinsip efektif. Untuk prinsip efisien besaran tingkat kesesuaian mencapai 87,91% dengan indikator EF13 menjadi yang paling tinggi yakni mencapai 96,75%. Sedangkan untuk prinsip efektif, besaran tingkat kesesuaian mencapai 86,31% dengan indikator tertinggi yaitu EFE1 mencapai 91,11%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penerapan prinsip efisien dan efektif dalam PBJP sektor konstruksi di Kota Surabaya telah memenuhi harapan para penyedia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sudaryanto dalam Siyamto (2017) bahwa Tki dengan persentase mencapai 80-100% maka dapat dikatakan kerjanya telah memenuhi harapan para penyedia, tetapi tetap perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan. Maka untuk mengetahui indikator apa saja yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki maka akan diperlukan analisis melalui pemetaan pada kuadran IPA atau yang disebut dengan *Importance Performance Matrix*. Adapun data yang digunakan sebagai basis data pemetaan adalah nilai rata-rata tingkat kinerja (x) dan tingkat kepentingan (y).

Analisis Kuadran IPA

Dalam pemetaan kuadran, terdapat beberapa kriteria kuadran. Hal ini menunjukkan posisi indikator yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitas pelayanannya. Dalam analisis sebelumnya diketahui rata-rata tingkat pelayanannya cukup memadai dengan tingkat kesesuaian semua indikator mencapai >80%.

Namun, di antara semua indikator tersebut jika dikaji maka diperlukan pemetaan untuk memaksimalkan pelayananan PBJP konstruksi.

Pemetaan kuadran IPA dibantu dengan program bantu komputer SPSS. Dengan bantuan program tersebut, maka dapat diperoleh hasil analisis kuadran untuk prinsip efisien dan prinsip efektif sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kuadran A (Prioritas Utama)

Kuadran A atau kuadran prioritas utama merupakan kuadran yang menunjukkan indikator tau elemen-elemen yang dirasa penting bagi responden penyedia PBJP konstruksi di Surabaya namun belum maksimal dirasakan jika dibandingkan dengan indikator lainnya dalam prinsip PBJP. Indikator pada kuadran ini harus diutamakan sehingga kinerja pelaksanaannya dapat menjadi lebih baik lagi. Adapun indikator-indikator yang tergabung dalam kuadran ini adalah:

a. Untuk Prinsip Efisien:

- **EFI2 (Pemangkas waktu proses pengadaan)**
Pengurangan waktu proses dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana sistem PBJP harus dilakukan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama (Khan, 2018). Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa harapan para penyedia agar layanan sistem PBJP dapat dilaksanakan dengan lebih cepat belum tercapai.

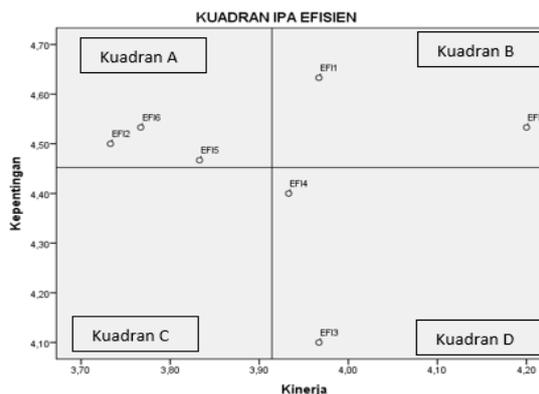
- **EFI5 (Pemangkas biaya administrasi);**
Dalam Sandi dan Rahman (2023), dinyatakan bahwa pemangkas biaya administrasi terkait dengan adanya manfaat pengadaan elektronik yang berimbas pada berurangnya biaya yang dikeluarkan termasuk untuk biaya pencocokan (faktur, inventaris), biaya komunikasi, dan sebagainya. Berdasarkan posisi kuadrannya, dapat disimpulkan indikator ini masih belum maksimal dirasakan oleh para penyedia.

b. Untuk Prinsip Efektif:

- **EFE4 (Integrasi program);**
Dalam kajiannya, Sandi et al (2020) menyatakan bahwa integrasi program dalam PBJP termasuk konstruksi adalah adanya sosialisasi dan komunikasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Berdasarkan kondisi kuadrannya, indikator ini dirasa belum maksimal dirasakan oleh para penyedia.

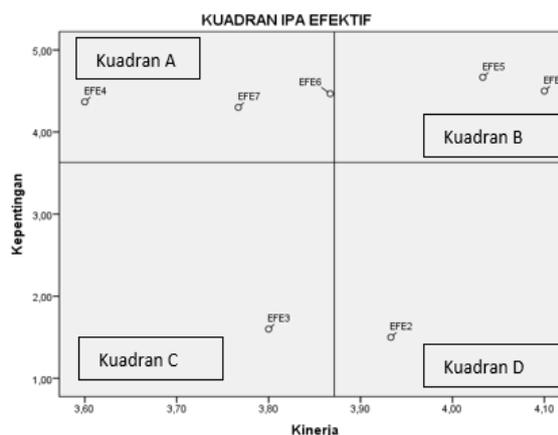
- **EFE6 (Kualitas sistem pengadaan);**
Layanan pengadaan menjamin kualitas sistem pengadaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan misalnya dalam login, input data, akses internet, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan kondisi posisi kuadran, indikator ini belum terasa maksimal diterapkan.

- **EFE7 (Minimalisasi komunikasi tatap muka).**
Komunikasi antar pihak terjalin dengan baik melalui sistem atau jalur komunikasi telah diatur dan tidak memerlukan komunikasi tatap muka. Dalam analisisnya, disimpulkan bahwa indikator ini belum terasa maksimal diterapkan untuk dirasa puas oleh penyedia.



Gambar 1. Kuadran IPA Prinsip Efisien

Sumber: Hasil pengolahan data



Gambar 2. Kuadran IPA Prinsip Efektif

Sumber: Hasil pengolahan data

Kuadran B (Pertahankan Prestasi)

Kuadran B berisi indikator atau atribut yang dirasa penting serta memuaskan bagi para penyedia. Kinerja indikator-indikator pada kuadran ini sehingga penyedia merasa puas. Atribut pada kuadran ini antara lain:

a. Untuk Prinsip Efisien:

- **EFI1 (Pemanfaatan sistem berbasis elektronik);**
Berdasarkan hasil analisis ini, pemanfaatan sistem PBJP yang telah menggunakan sistem elektronik dirasa sudah memuaskan para penyedia yang mengikuti kegiatan PBJP konstruksi di kota Surabaya.

- **EFI7 (Ketersediaan sistem klasifikasi jenis pekerjaan yang terstandar);**
Sandi et. al (2020) menyatakan bahwa indikator ini terkait erat dengan upaya secara sistematis dan terstandar untuk memudahkan para penyedia untuk melakukan pencarian data jenis pekerjaan sehingga terhindar dari kebingungan dalam mencari dan melacak informasi.

b. Untuk Prinsip Efektif:

- **EFE1 (Ketercapaian tujuan pengadaan);**
Pencapaian tujuan (*goals*) tujuan tercermin dari produk pengadaan yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan.

- EFE5 (Mekanisme pengendalian yang efektif); Hal ini terkait dengan indikator EFE1, bahwa diperlukan suatu mekanisme yang harus dijalankan untuk menjamin keterlaksanaan pengadaan sudah sesuai dengan tujuan pengadaan atau PBJP, khususnya di sektor konstruksi.

Kuadran C (Prioritas Rendah)

Kuadran C berisi indikator atau atribut yang dirasa kurang penting serta kinerja penerapan prinsip tersebut juga tidak terlalu diperhatikan sehingga kualitas penerapannya tidak terlalu baik. Pada prinsip efisien, berdasarkan analisis pemetaan kuadran tidak terdapat indikator yang tergabung dalam indikator ini. Sedangkan pada prinsip efektif terdapat indikator EFE3 (Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat).

Kuadran D (Prioritas Berlebihan)

Kuadran D menunjukkan indikator atau atribut yang dirasa kurang penting bagi responden penyedia, tetapi pada kinerja penerapannya dilakukan dengan baik sehingga para penyedia menilai hal tersebut terlalu berlebihan dan hanya akan memboros sumber daya. Adapun indikator-indikator yang tergabung dalam kuadran ini adalah:

a. Untuk Prinsip Efisien:

- EFI3 (Penurunan jumlah sanggahan); Penurunan jumlah sanggahan mencerminkan sistem dan kualitas pelayanan yang baik. Namun berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah sanggah tidak terlalu penting bagi para penyedia.
- EFI4 (sistem akses yang terpusat); Sandi dan Rahman (2023) menyatakan bahwa indikator ini dimaksudkan dengan pengelolaan informasi yang tersedia pada satu portal/*web*. Berdasarkan analisis ini, indikator ini ternyata dirasa tidak terlalu penting oleh para penyedia.

b. Untuk Prinsip Efektif:

- EFE2 (ketepatan waktu pelaksanaan) Indikator ini terkait dengan layanan dan sistem pengadaan menjamin pelaksanaan pengadaan dengan tepat waktu. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa indikator ini jika dinilai hanya pada prinsip ini, maka dinyatakan tidak terlalu penting dibandingkan dengan indikator lainnya dalam prinsip efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesesuaian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Importance Performance Analysis* dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian penerapan prinsip efektif dan efisien PBJP konstruksi pemerintah di Kota Surabaya secara umum telah sesuai dengan harapan para penyedia. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesesuaian penerapan prinsip efisien dan efektif yang masing-masing mencapai 87,91% dan 86,31%. Namun, dengan nilai yang masih di bawah 100%, maka perlu untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan analisis dengan pemetaan kuadran, diperoleh indikator yang diperlukan untuk segera diperbaiki dengan klasifikasi kuadran A (prioritas utama perbaikan) untuk meningkatkan

kesesuaian penerapan prinsip efektif di antaranya adalah pemangkasan waktu proses pengadaan dan pemangkasan biaya administrasi. Sedangkan untuk meningkatkan kesesuaian prinsip efisien di antaranya adalah dengan memperbaiki indikator integrasi program, kualitas sistem, dan minimalisasi jumlah tatap muka dalam pelaksanaan sistem tata muka.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Mohammad Arif Rohman, S.T.,M.Sc.,Ph.D untuk bantuan dan bimbingan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Lynch, J. (2013), *Public Procurement: Principle, Categories and Methods*, Leanpub
- Sandi, P.V., Rahman, M.A., Utomo, C. (2020). "A concept to evaluate procurement principles implementation of public construction project in Surabaya". *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* **930** 012005
- Sandi, P.V., Rahman, M.A (2023). "Evaluation of the Public Procurement Principles Implementation in Surabaya Construction Projects". Prosiding, International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering
- Sandi, P.V. (2021). "Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Proyek Konstruksi Pemerintah Di Kota Surabaya Berdasarkan Sudut Pandang Penyedia Jasa". Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya